

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO**



BASO ERWIN HIDAYATULLAH
10564 11094 18

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

BASO ERWIN HIDAYATULLAH
10564 11094 18

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak
Panas Sekolah di Kabupaten Wajo

Nama Penyusun : Baso Erwin Hidayatullah

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11094 18

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

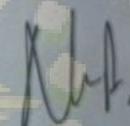
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)



Pembimbing I

Pembimbing II

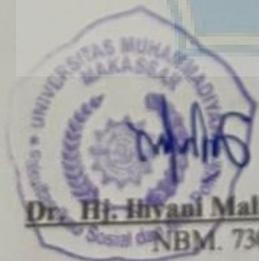

Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si


Dr. Nurwahid, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207163

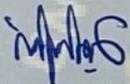
HALAMAN PENERIMAAN TIM

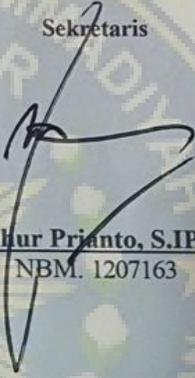
Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0234/FSP/A.4-11/11/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024.

Mengetahui,
Tim Penilai :

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 1207163

Tim Penguji :

1. Dr. Hafiz Elfiansyah P, S.T., M.Si
2. Nur Khaerah, S.IP., M.IP
3. Hardianto Hawing, S.T., MA.

ABSTRAK

BASO ERWIN HIDAYATULLAH. 2024. *Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. (Dibimbing oleh Hafiz Elfiansyah Parawu dan Nurwahid).

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Collaborative Governance* dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan jumlah informan sebanyak 2 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan dan pengujian kesimpulan. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo : yaitu, a. *Face to face dialog* (dialog tatap muka). Adanya dialog tatap muka yang diselenggarakan secara rutin dan intensif per 3 bulan sekali berdasarkan keputusan bersama, mendorong terciptanya sistem kolaborasi yang efektif terkait penanganan persoalan yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan penanganan anak putus sekolah. b. *Trust Building* (membangun kepercayaan). Untuk itu, membangun rasa percaya tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari indikator dialog tatap muka. c. *Commitment to the process* (komitmen terhadap proses). Semakin tergantung suatu aktor dalam proses kolaborasi maka akan semakin memperkuat komitmen terhadap hubungan yang dijalin. d. *Shared understanding* (saling memahami). Saling berbagi pemahaman, informasi, data, maupun permasalahan yang dialami masing-masing sektor terkait penanganan anak putus sekolah menciptakan proses kolaborasi yang efektif dan solutif terhadap persoalan yang sedang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. e. *Intermediate outcome* (hasil akhir yang dicapai). Hasil sementara yang didapat melalui proses kolaborasi penanganan anak putus sekolah, tidak hanya pada penurunan angka anak putus sekolah. Namun juga keberhasilan dalam meningkatkan antusiasme masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk membawa anaknya bersekolah.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Penanganan Anak Putus Sekolah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan setitik ilmu-Nya serta nikmat yang tak berujung sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan dan amanah yang tak pernah padam sampai akhir zaman. Skripsi ini berjudul “***Collaborative Governance dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo***” dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis ucapkan penuh kerendahan hati, rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta, Alm. H. Burhanuddin dan Ibunda Hj. Besse Rohani, S.Pd serta saudara kandung penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungannya baik moral maupun materi yang diberikan kepada penulis.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu., M.Si selaku pembimbing pertama dan bapak Dr. Nurwahid, S.Sos., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Hardianto Hawing, ST., MA selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Khususnya angkatan 2018 Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi *stakeholder* di masa yang akan datang. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Makassar, 22 Januari 2024

Penulis

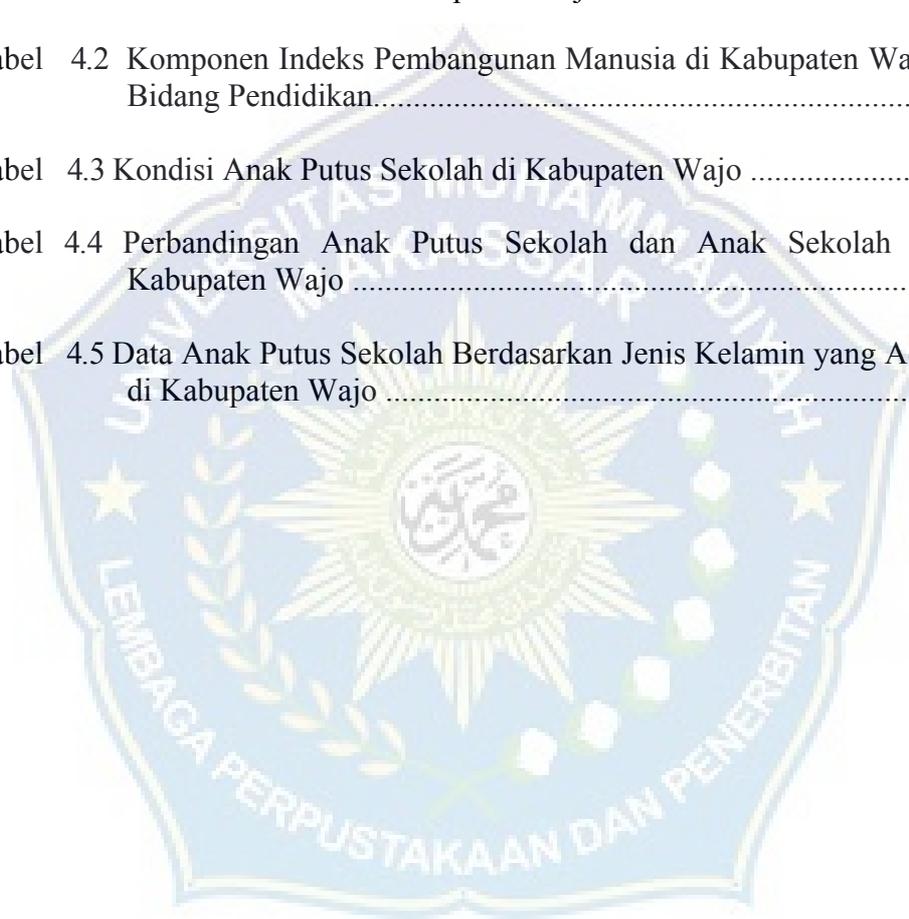
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	10
C. Kerangka Pikir	17
D. Fokus Penelitian	18
E. Deskripsi Fokus Penelitian	19

BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
B. Jenis dan Tipe Penelitian	21
C. Sumber Data	22
D. Informasi Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24
G. Teknik Keabsahan Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	27
B.... <i>Collaborative Governance</i> dalam Penerapan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo (Hasil Penelitian)	36
C.... Pembahasan Hasil Penelitian	45
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B.... Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian	23
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Wajo 2020	29
Tabel 4.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Wajo Bidang Pendidikan.....	30
Tabel 4.3 Kondisi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo	44
Tabel 4.4 Perbandingan Anak Putus Sekolah dan Anak Sekolah di Kabupaten Wajo	46
Tabel 4.5 Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin yang Ada di Kabupaten Wajo	47



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	18



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Informan	57
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian	58
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	59
Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiat	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan sektor publik dengan privat dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebuah negara dapat dikatakan maju dan berkembang dapat dilihat dari pemerintahannya. Pemerintah dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya gerakan perubahan yang disusun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu strategi baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini yaitu *Collaborative Governance*. Perkembangan lingkungan yang semakin mengglobal saat ini menuntut adanya peran pemerintah dalam memwadahi semua kepentingan dalam kerangka demokrasi. Maka dari itu, *Collaborative Governance* atau kolaboratif pemerintahan hadir sebagai suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat (Irawan, 2017).

Collaborative merupakan respon terhadap perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran lingkungan kebijakan. Pergeseran-pergeseran ini bisa terjadi dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat, isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi, kapasitas pemerintah terbatas sedangkan institusi-institusi di luar pemerintah meningkat serta pemikiran masyarakat yang semakin kritis. Ketika pergeseran tersebut terjadi, maka pemerintah harus mengikuti segera,

menyelesaikan dan atau mengatasi apa yang tengah menjadi isu di dalamnya. Namun demikian pemerintah tetap harus menyesuaikan dan membuat dirinya tetap relevan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan cara berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat yang berkepentingan dan terkena dampak kebijakan atau masalah publik yang ada (Mutiarawati & Sudarmo, 2021).

Pengembangan minat belajar itu dapat diartikan sebagai perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang (siswa) terhadap aktivitas belajar yang ditujukan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam belajar serta menyadari pentingnya kegiatan itu. Selanjutnya terjadi perubahan dalam diri siswa yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman belajar. Minat siswa untuk belajar mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan belajar, karena minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan siswa, bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, sebab tidak ada daya tarik baginya. Oleh karena itu, untuk mengatasi siswa yang kurang berminat dalam belajar, guru hendaknya berusaha bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu selalu butuh dan ingin terus belajar. Minat belajar sangat mendukung dan mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran. Secara singkat yang dimaksud dengan minat belajar adalah kecenderungan dan perhatian dalam belajar (Ubaidillah, 2020).

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi kebutuhan dasar untuk masing-masing manusia sehingga usaha untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa perlu dilakukan. Melalui pendidikan, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana. Pendidikan berperan sebagai sarana pembangunan karakter bagi suatu bangsa untuk menunjukkan jati dirinya. Pendidikan dengan tingkat yang semakin tinggi dapat menurunkan jumlah kemiskinan. Pendidikan juga merupakan satu modal dasar yang diharapkan dapat meningkatkan derajat dan martabat manusia serta peningkatan kualitas dari sumber daya manusia. Pendidikan sebagai faktor penentu bagi wanita untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja (Asmara & Sukadana, 2016).

Pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu bangsa dapat dikatakan demikian manakala tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di negara tersebut haruslah tinggi pula. Keberhasilan suatu negara banyak bergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya, di Indonesia sendiri banyak dijumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya saja adalah putus sekolah.

Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana respon pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut, karena secara tidak langsung orang yang tidak mengenyam pendidikan ataupun sudah dapat mengenyam akan tetapi putus di tengah jalan. Bisa saja berasal dari anak-anak yang cerdas, bahkan sebaliknya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, harus dicarikan solusi yang tepat untuk

mengatasinya. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan utama yang tak dapat dikesampingkan, sebab pendidikan akan membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk keperibadian utama. Hal ini jelas telah di amanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi.

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah-daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

Data dinas pendidikan menunjukkan masih adanya kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo setiap tahunnya menjadi ironi bagi pemerintah daerah, dimana kondisi anak putus sekolah pada tahun 2022 mencapai angka 703 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah. Kondisi anak putus sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan. Kondisi anak putus sekolah sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Pemerintah Kabupaten Wajo bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi pembangunan kabupaten Wajo. Olehnya itu bertolak dari latar belakang, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Collaborative Governance* anak putus sekolah di Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini untu mengetahui *Collaborative Governance* dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.
 - b. Memberikan masukan terhadap penanganan *Collaborative Governance* anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
 - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat *Collaborative Governance* anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lain. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu pada (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Vicky Kusmawati (Kusmawati Vicky, 2020)	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018	Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kolaborasi pemerintah daerah dalam mengurangi anak putus sekolah di kabupaten Pelalawan tahun 2017-2018 tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kolaborasi yang dilakukan oleh Aktor tersebut di kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik. Dalam hal ini terlihat dari kolaborasi pemerintah masih belum terjalin kerjasama sehingga banyak anak putus sekolah di kabupaten Pelalawan. 2. Untuk menekan angka putus sekolah, maka pendataan mengenai anak putus sekolah harus dilakukan dengan berkesinambungan oleh

			<p>pemerintah kabupaten Pelalawan. 3. Pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi, edukasi yang sifatnya berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan untuk menghindari angka putus sekolah. 4. Aktor kolaborasi pemerintah daerah dalam mengurangi anak putus sekolah di kabupaten Pelalawan tahun 2017-2018 adalah aktor pemerintah, sekolah, orang tua.</p>
2.	<p>Andayani, Luci Dian Yusuf, Muhamad Mambang, Mambang Toun, Nicodemus R (Andayani <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (ATS) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur</p>	<p>Strategi untuk mengantisipasi dan menangani ATS di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur, pemerintah daerah dengan BAPPEDA sebagai koordinator, mengkoordinir Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan anak putus sekolah dengan melakukan koordinasi dan sinergi bersama petugas TLD dalam pelaksanaan pendataan ATS di Kotawaringin Timur. Pendekatan persuasif dari petugas lapangan, membuat anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) yang berhasil di data</p>

		<p>bersedia untuk kembali belajar baik melalui jalur formal (sekolah) maupun melalui lembaga-lembaga nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Sehingga sarannya untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus memaksimalkan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dalam penanganan dan pencegahan munculnya ATS baru diluar ATS yang sudah menjadi sasaran pendataan dan penanganan dalam program sebelumnya.</p>
--	--	--

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

1. Penelitian terdahulu membahas tentang Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah sedangkan peneliti membahas tentang *Collaborative Governace* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang anak yang putus sekolah.
2. Penelitian terdahulu membahas tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (ATS) di Wilayah Kabupaten

Kotawaringin Timur sedangkan peneliti membahas tentang *Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang anak yang putus sekolah.

B. Kerangka Teori

1. *Good Governance*

Prinsip *Good Governance* yang diciptakan *World Bank* justru dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan terutama di negara-negara berkembang (Scholte, 2012). Apalagi ketika prinsip *Neoliberalisme* yang diperkenalkan pada tahun 1946 oleh sekelompok jaringan masyarakat yang sukses menerapkan suatu hegemoni kebijakan di beberapa negara di dunia. *Neoliberalisme* kemudian masuk dan diterapkan dalam setiap kebijakan ekonomi di negara maju. *Neoliberalisme* merupakan suatu paham yang menganut prinsip-prinsip seperti mengutamakan investasi asing yang masuk ke suatu negara, menciptakan kondisi yang seimbang antara investasi internal dan eksternal, melegalkan ijin-ijin usaha dan menasionalisasikan investasi asing. Hal ini membuat ekonomi di suatu negara akan semakin maju, namun menciptakan krisis di negara belahan dunia lainnya. Sehingga tujuan *Good Governance* yang digagas oleh *World Bank* untuk memberantas kemiskinan di negara berkembang, justru gagal di implementasikan. Selain itu, praktek *Good Governance* yang digagas oleh UNDP pun menuai kritik. UNDP mengungkap *Good Governance* dalam *Frame Democratic Governance*.

Konsep untuk *Good Governance* tidak bisa serta merta di

implementasikan di suatu negara, perlu adanya penyesuaian terhadap karakteristik kondisi dan karakteristik dari masing-masing negara. Alhasil, *Good Governance* ketika dipaksakan di suatu negara bisa menjadi cacat. Artinya konsep *Good Governance* ini mencoba untuk menerjang tatanan yang ada di negara tersebut dengan memasukkan prinsip-prinsip yang diusung oleh UNDP. Hal ini bisa menghilangkan prinsip-prinsip lokalitas yang murni berasal dari negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, negara-negara donor juga mempunyai keberagaman politik dan kapitalisme yang dapat mempengaruhi negara-negara yang menerima donor tersebut. *Good Governance* mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul tuntutan pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan dan sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya *control social* yang berasal dari partisipasi masyarakat. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pun masih belum menemukan pemaham yang baik mengenai apa itu *Good Governance* sehingga dalam implementasinya, konsep ini belum dapat berjalan dengan baik. Pemerintahpun mulai mempunyai komitmen untuk menjadikan *Good Governance* sebagai landasan atau pondasi nilai pemerintahan (Handayani & Nur, 2019).

2. Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah strategi yang digunakan dalam perencanaan, regulasi, pembuatan kebijakan, dan manajemen publik untuk

mengoordinasikan, mengadili, dan mengintegrasikan tujuan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dalam arti tersempitnya, *Collaborative Governance* adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan memfasilitasi kerja sama antar lembaga publik, kelompok kepentingan, dan warga negara (Ferry Afrisal *et al.*, 2022). *Collaborative Governance* dalam proses kolaborasi yang dimaksud adalah adanya keterlibatan masyarakat secara konstruktif baik dalam batas-batas lembaga publik, tingkatan pemerintah dan masyarakat umum, masyarakat sipil dan swasta dalam proses pembuatan keputusan kebijakan publik, yang mana tanpa keterlibatannya tujuan tidak bisa tercapai.

Menurut (Ansell & Gash, 2007 : 544) *Collaborative Governance* adalah perjanjian atau kerjasama dimana agen publik dan *stakeholders* non pemerintah dalam proses pembuatan keputusan kolektif yang bersifat formal, berdasarkan konsensus, dan bersifat *deliberative* yang bertujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, atau manajemen program/aset publik (A. R. Fauzi & Sri Rahayu, 2019).

Dalam tulisan ini, teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash digunakan sebagai dasar pijakan dimana teori tersebut menyebutkan bahwa “*a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*” (Ansell & Gash 2007 : 544). Dengan artian *Collaborative Governance* adalah model pengendalian

dimana satu atau beberapa lembaga publik melibatkan para *stakeholders non State* atau para pemangku kepentingan diluar lembaga publik dalam proses pengambilan kebijakan kolektif yang bersifat formal, konsensus dan deliberatif dengan tujuan untuk membuat serta menerapkan kebijakan publik dan mengelola program publik (Ansell & Gash dalam Islamy, 2018 : 2) (Molla *et al.*, 2021). Sehingga dalam proses kolaborasi bergantung pada suatu siklus yang berulang kali terjadi mulai dari dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman sampai kepada hasil yang ingin dicapai. Siklus tersebut akan terus berputar dan berulang selama proses kolaborasi berlangsung (Ansell & Gash, 2007: 557).

Face To Face Dialogue dalam proses kolaborasi komunikasi merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai kesepakatan bersama. Tidak hanya itu, komunikasi juga merupakan suatu media penting bagi pembentukan dan pengembangan pribadi dalam konteks sosial. Dengan komunikasi kita dapat tumbuh dan belajar, menemukan pribadi kita dan orang lain, bernegosiasi, membenci dan lain sebagainya. Bentuk komunikasi yang terjadi dalam suatu proses kolaborasi biasanya dilakukan melalui interaksi tatap muka (*face to face dialogue*) dengan *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi. Sehingga dengan adanya *face to face dialogue* maka persamaan informasi sehingga akan memunculkan kesepakatan bersama. Selain itu, *face to face dialogue* juga dapat menjadi alat untuk membangun kepercayaan dan komitmen diantara *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi (Ipan *et al.*, 2021).

Menurut Islamy (2018), *Collaborative Governance* diartikan sebagai sebuah keseimbangan antara sumberdaya maupun kewenangan antara para pihak yang memiliki kepentingan dan melakukan intervensi kepada kelompok yang memiliki keterbatasan sehingga adanya sifat ketergantungan dalam mengatasi suatu persoalan lewat keputusan yang kolektif dan kesepakatan bersama. *Collaborative Governance* berlandaskan pada tujuan dalam mengatasi permasalahan atau isu tertentu dengan para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya para pemerintah tetapi juga dapat melibatkan pihak non pemerintah. Berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat sipil sudah seharusnya dilibatkan dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerja sama dapat dibangun karena adanya keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak. Oleh karena itu, kerja sama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Kedudukan masing-masing pihak harus bersifat setara dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerja sama. Masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara *independent* walaupun terikat pada kesepakatan bersama (Qoyimah *et al.*, 2022).

Collaborative Governance sebagai strategi pemerintah untuk mengkolaborasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, merancang dan membuat kebijakan terkait program yang hendak dilakukan yaitu pembuatan produksi film pendek untuk bisa berkomunikasi, memberi semangat dan

mengobati rasa rindu kepada orang tuanya. Hal ini akan membantu pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk mewujudkan program tersebut (Ansell, 2012) dan *stakeholder* (seperti APM, orang tua yang bekerja di luar negeri sebagai PMI, LPKP, ILO dan UNICEF) juga bisa memanfaatkan dari program tersebut, sehingga mereka ini memiliki peran masing-masing. Dukungan dari pemerintah desa, sebagai salah satu bentuk kebijakan inklusi pada APM. Seperti dikatakan Davies dan White (2012) komunitas sering kali kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dalam pembuatan program (Koesbardiati *et al.*, 2022).

3. Konsep Penanganan Anak Putus Sekolah

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar atau terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Padahal anak adalah manusia yang akan meneruskan cita-cita orang tuanya dan sebagai estafet untuk masa yang akan datang (Talakua, 2018). Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Menurut Djumhur dan Surya jenis putus sekolah dapat dikelompokkan atas tiga yaitu: putus sekolah atau berhenti dalam jenjang, putus sekolah di ujung jenjang, dan putus sekolah atau berhenti antara jenjang. Putus sekolah secara umum dapat diartikan sebagai orang atau anak yang keluar dalam suatu sistem pendidikan

sebelum mereka menamatkan pendidikan sesuai dengan jenjang waktu sistem persekolahan yang diikuti. Dengan demikian putus sekolah dapat pula diartikan tidak tamat atau gagal dalam belajar ketingkat lanjut (Nurohman & Qurniawati, 2021).

Studi kebutuhan pelayanan anak jalanan merupakan tema penelitian yang dilakukan oleh Mujiyadi *et al* (2011) yang dilakukan di beberapa provinsi yaitu: Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini akhirnya membuat kesimpulan bahwa, anak jalanan merupakan sebagian dari anak terlantar, yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasarnya meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Bagi anak jalanan, kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi ialah kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kesehatan. Pada saat yang sama mereka harus diberikan haknya untuk memperoleh pendidikan. Penelitian ini juga menemukan harapan bagi anak jalanan yaitu bahwa, pada dasarnya anak ingin diakui eksistensinya, dapat mengisi hidupnya dengan wajar, dapat mengikuti pendidikan sampai tingkat tertinggi, dan memungkinkan untuk menyalurkan bakat dan keterampilan sesuai dengan talentanya (Mujiyadi, 2011). Dari beberapa kesimpulan penelitian tersebut tampak jelas bahwa persoalan anak-anak terlantar dan anak jalanan dapat menjadi indikasi tidak terpenuhinya hak-hak sosial anak, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu perlu dikaji secara empiris mengenai perluasan dan pemerataan akses pendidikan khususnya bagi anak-anak terlantar (I Nyoman Wijana1, 2018).

Kesulitan atas pemenuhan hak pendidikan serta akses pendidikan

berdampak pada munculnya fenomena kehidupan anak jalanan dan anak putus sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Adanya fenomena tersebut menyebabkan sering ditemukan anak-anak tereksplorasi, berada dijalan, ikut orang tua mencari nafkah bahkan cenderung rentan terlibat dalam tindak kriminal lainnya. Padahal baik anak jalanan maupun anak putus sekolah memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Untuk merubah keterbatasan yang dialami anak jalanan dan anak putus sekolah diperlukan pemberdayaan melalui akses pendidikan. Pemberdayaan yang diberikan bukan hanya sebatas apa yang diperlukan anak jalanan, akan tetapi dapat mengajarkan serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan sekaligus membuat anak-anak tersebut agar tidak kembali turun kejalan untuk mencari nafkah (Trytami *et al.*, 2022).

C. Kerangka Pikir

Ansell dan Gash lebih lanjut mengartikan *Collaborative Governance* sebagai suatu pengaturan pemerintah pada satu atau lebih lembaga publik dengan langsung melibatkan peran swasta dalam pengambilan suatu keputusan secara kolektif yang bersifat formal dengan berorientasi *consensus* dengan bertujuan untuk membuat serta menerapkan kebijakan publik serta mengelola program maupun aset yang berkenaan dengan publik. Berdasar pada pengertian diatas memberi gambaran bahwa *Collaborative Governance* adalah sebuah proses yang memiliki suatu peraturan tertentu yang dilaksanakan bersama serta berinteraksi untuk saling menguntungkan antar *stakeholders* yang terlibat. (Gunawan & Ma'ruf, 2020).



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini yaitu terdapat lima fungsi utama dalam *Collaborative Governance* Anak Putus Sekolah yaitu: *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitment to the*

process (komitmen terhadap proses), *shared understanding* (saling memahami), *intermediate outcome* (hasil akhir yang dicapai).

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Pada tahap dialog tatap muka para *stakeholders* yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan (Ansell dan Gash, 2007 : 558). Adanya dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejolak dalam proses berjalannya suatu kolaborasi.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah kolaborasi bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing *stakeholders* yang terlibat. Kepercayaan tidak akan langsung hadir begitu saja, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi.

3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)

Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan

yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

4. *Shared Understanding* (saling memahami)

Stakeholders dalam sebuah proses kolaboratif pada suatu titik tertentu membutuhkan pengembangan terhadap suatu proses pada pemahaman bersama dari apa yang dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama juga didefinisikan sebagai proses penyamaan pemahaman terkait suatu pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi.

5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu kolaborasi, perancangan dan penyetusan sebuah hasil akhir diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen untuk dapat menjalankan tupoksi pada masing-masing *stakeholders* guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo terkait *Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan setelah pelaksanaan seminar proposal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam ke lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu peran pemerintah dalam meningkatkan modal sosial untuk keberlanjutan masyarakat yang terdiri dari peran alokasi sumber daya, peran regulator, dan peran kesejahteraan sosial dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dengan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok-pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dimana metode tersebut adalah mengambil sampel yang dapat mewakili perspektif lebih luas dari kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian terkait *Collaborative Governance* dalam Penerapan Anak

Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud dapat dilihat pada (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Dinas Pendidikan	1
Dinas Sosial	1
LPA (Lembaga Pelindungan Anak)	1
Masyarakat	1
Jumlah	4

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah *editing*, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenan dengan aktivitas serta proses-proses

sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini membantu proses analisis.

3. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Wajo merupakan salah satu dari 20 kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak diantara $3^{\circ}29'$ - $4^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan diantara $119^{\circ}53'$ - $120^{\circ}27'$ Bujur Timur, merupakan daerah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan pada zona tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat dengan luas wilayah Kabupaten Wajo adalah 2.506,19 km² dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng
- c. Sebelah Timur : Teluk Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap

Secara administratif, Kabupaten Wajo terbagi atas 14 wilayah Kecamatan yang kemudian terbagi lagi menjadi 48 wilayah berstatus Kelurahan dan 128 wilayah berstatus Desa, dengan Ibu Kota Kabupaten di Sengkang yang terletak di Kecamatan Tempe. Masing-masing wilayah Kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, meskipun perbedaan itu relatif kecil sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya.

Di dalam khasanah Lontara Wajo, karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terletak dengan posisi

“Mangkalungu Ribulue, Massulappe Ripottanangge, Mattodang Ritasie/Tappareng”, yang artinya Kabupaten Wajo memiliki 3 dimensi lahan yaitu :

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke utara yang semakin bergunung, utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua, sebagai wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta pengembangan ternak.
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat.
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah timur, terbentang sepanjang 203 km garis pantai sebagai wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Wajo tahun 2020 adalah sebanyak 394.789 jiwa, yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 188.250 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 206.539 jiwa. Berdasarkan data penduduk di publikasi ini, sex rasio penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2020 sebesar 91,15% dan rata-rata laju pertumbuhan penduduknya dari tahun 2015 hingga 2020 sebesar 0,8%. Kepadatan penduduk Kabupaten Wajo sebesar 157 jiwa/km² dan hampir

99,13% beragama islam. Jumlah Penduduk di Kabupaten Wajo 2020 dapat dilihat pada (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Wajo 2020

Kecamatan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sabbangparu	12.079	14.138	26.217
Tempe	29.254	31.908	61.162
Pammana	14.966	16.694	31.660
Bola	9.416	10.386	19.802
Takkalalla	9.291	9.784	10.075
Sajoanging	10.134	11.188	21.322
Penrang	7.456	8.673	16.129
Majauleng	15.082	17.312	32.394
Tanasitolo	19.073	21.458	40.531
Belawa	15.405	17.080	32.485
Maniangpajo	7.874	8.473	16.347
Gilireng	5.582	5.928	11.510
Keera	11.335	11.576	22.911
Pitumpanua	21.303	21.941	43.244
Kabupaten Wajo	188.250	206.539	394.789

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2020

b. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan maupun kedewasaan dalam demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah, dalam hal ini pendidikan adalah sebuah kunci kesuksesan sebuah daerah untuk memajukan daerahnya dengan adanya persaingan kualitas dan mutu masyarakatnya di era sekarang

ini. Ukuran keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari indeks pendidikan yang merupakan gabungan dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Tahun 2022, kondisi pendidikan Kabupaten Wajo memperlihatkan tren yang semakin membaik dibanding dengan kondisi-kondisi tahun yang lalu. Fakta tersebut digambarkan oleh indeks pendidikan. Namun bila dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan terlihat bahwa indeks pendidikan Kabupaten Wajo relatif masih rendah, hal tersebut dapat dilihat pada (Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Wajo Bidang Pendidikan

Pendidikan	2020	2021	2022
Angka melek huruf	83.53	84.97	84.99
Rata-rata lama sekolah	6.22	6.51	6.60
Indeks pendidikan	69.51	71.11	71.32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2022

Dalam periode 2020-2022, jumlah yang dapat membaca dan menulis meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf yang meningkat dari 83.53 pada tahun 2020 menjadi 84.99 pada tahun 2022. Namun demikian, jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan, 84.50 pada tahun 2020 menjadi 86.24 tahun 2021 angka melek huruf Kabupaten Wajo masih relatif rendah.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wajo pada tahun 2022 adalah 6 tahun. Artinya, pada tahun 2022 setiap penduduk mempunyai jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan sedang duduk di kelas 6. Angka ini telah

meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun meningkat, angka ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Kesehatan

Upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan, antara lain penyuluhan dan penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, pustu, pondok bersalin desa serta penyediaan air bersih. Upaya tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan peran aktif terutama pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Selain jumlahnya yang kurang, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih menjadi kendala. Pada tahun 2022 terdapat 23 Puskesmas, 54 Puskesmas Pembantu, 95 Polindes, 3 Rumah Sakit, 64 Praktek Dokter dan 44 Praktek Bidan, 21 Apotik.

Walaupun Puskesmas terdapat hampir semua Kecamatan, namun kualitas pelayanan sebagian besar Puskesmas dan RS pada umumnya masih di bawah standar. Pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas, karena lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu. Perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat semakin rentan akibat meningkatnya kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan di Bidang

Kesehatan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, masih tingginya penyebaran penyakit menular dan penyalahgunaan obat terlarang, rendahnya kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat dalam menjangkau biaya kesehatan serta perlunya penyebaran tenaga medis sesuai kebutuhan penduduk.

Kualitas kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana masyarakat tinggal. Permasalahannya, kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan dalam hal berwawasan lingkungan hidup yang sehat guna mencegah adanya wabah penyakit menular atau Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah penyakit. Pengaruh aktivitas masyarakat sehari-hari terhadap lingkungan memang baru dirasakan setelah beberapa tahun berjalan. Pengaruh yang tidak langsung inilah yang membuat masyarakat kurang menyadari pentingnya memelihara lingkungan. Dalam hal penanganan sampah, masyarakat masih mengaggap bahwa pemerintah melalui Dinas Kebersihan adalah pihak yang bertanggung jawab. Untuk itu, kedepannya perlu sinergi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan masalah sampah.

d. Potensi-Potensi Daerah

Potensi pariwisata unggulan di Kabupaten Wajo adalah Wisata Alam Danau Tempe dan Agrowisata Sutera. Disamping itu, juga terdapat lokasi-lokasi wisata yang lain baik wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Setiap tahun dilaksanakan acara Festival Danau Tempe dirangkaikan dengan

ritual Maccera Tappareng (mensucikan danau) yang dapat menjadi tontonan Wisatawan dan Mancanegara.

Panjang garis pantai Kabupaten Wajo adalah 103 Km yang meliputi enam Kecamatan, sehingga sangat mendukung pengelolaan potensi perikanan laut. Panjang garis pantai ini sangat mendukung pengelolaan potensi perikanan laut. Penangkapan ikan pada umumnya masih menggunakan sistem tradisional sehingga input teknologi penangkapan berupa sarana pendukung dan peralatan alat tangkap modern sangat dibutuhkan. Selain itu investasi pendirian pabrik es juga diperlukan dalam penyediaan es untuk penanganan hasil tangkapan. Berdasarkan data Tahun 2022 produksi perikanan laut mencapai 10.451 ton.

Selain potensi-potensi yang disebutkan sebelumnya, Sengkang yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Wajo letaknya kurang lebih 250 km dari Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan sejak dulu juga dikenal sebagai kota niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam berdagang. Berbagai macam kebutuhan hidup seperti pakaian, sepatu, tas, barang elektronik, kain sarung bahkan kebutuhan pokok lainnya konon memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan di daerah lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika Sengkang menjadi salah satu kota dengan perputaran ekonomi yang sangat tinggi di Sulawesi Selatan.

Disamping dikenal sebagai kota niaga, Sarung Sutera menjadikan Ibu Kota Kabupaten Wajo semakin akrab ditelinga dan hati orang-orang yang pernah berkunjung ke kota ini, kelembutan dan kehalusan tenunan sarung

sutera Sengkang sudah sedemikian dikenal bahkan hingga ke Mancanegara. Hampir disetiap Kecamatan di daerah ini ditemukan kegiatan persuteraan dimulai dari kegiatan proses hulu sampai ke hilir, kegiatan pemeliharaan ulat sutera hingga proses menjadi benang yang kemudian ditenun menjadi selebar kain sutera.

Dalam bahasa lokal (Bugis) sutera disebut dengan "Sabbe", dimana dalam proses pembuatan benang sutera menjadi kain sarung sutera masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan tenun tradisional yaitu alat tenun gedogan dengan berbagai macam motif yang diproduksi seperti motif "Balo Tettong" (bergaris atau tegak), motif "Makkalu" (melingkar), motif "Mallobang" (berkotak kosong), motif "Balo Renni" (berkotak kecil). Selain itu ada juga diproduksi dengan mengkombinasikan atau menyisipkan "Wennang Sau" (lusi) timbul serta motif "Bali Are" dengan sisipan benang tambahan yang mirip dengan kain Damas.

e. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo pada Bab III (tiga) Bagian Pertama Pasal 3 menyatakan bahwa : Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 4 dijelaskan bahwa : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Rutin SKPD
 - a) Program pelayanan administrasi perkantoran
 - b) Program peningkatan sarana prasarana aparatur
 - c) Program peningkatan disiplin aparatur
 - d) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - e) Program perencanaan dan pelaporan, kinerja dan keuangan

2. Urusan Wajib Pendidikan

- a) Program pendidikan anak usia dini
- b) Program pendidikan non formal dan informal
- c) Program wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun
- d) Program pendidikan menengah dan kejuruan
- e) Program pengkajian perencanaan pendidikan
- f) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- g) Program manajemen pelayanan pendidikan

B. Collaborative Governance dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo (Hasil Penelitian)

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Pada masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana dalam memasuki era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting peranannya. Orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk mengejar teknologi yang semakin canggih. Tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak, baik dari strata tingkat dasar sampai jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang sudah dapat mengenyam pendidikan dasar namun pada akhirnya putus sekolah juga. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga yakni LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dalam melakukan penanganan anak putus sekolah, karena Pemerintah Kabupaten Wajo tidak bisa

menangani anak putus sekolah dengan sendirinya, ini bertujuan agar segala permasalahan yang berhubungan dengan anak putus sekolah dapat terakomodir dengan baik dan efektif.

Collaborative Governance adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak ketiga, ataupun dengan pihak lembaga pemerintah yang lainnya yang mempunyai permasalahan yang sama dengan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo, penulis menggunakan 5 indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)
2. *Trust building* (membangun kepercayaan)
3. *Commitment to the process* (komitmen terhadap proses)
4. *Shared understanding* (saling memahami)
5. *Intermediate outcome* (hasil akhir yang dicapai)

a. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Dialog tatap muka merupakan langkah awal dalam proses *Collaborative Governance*. Dalam proses ini, para *stakeholders* yang terlibat mulai membangun komunikasi melalui pertemuan secara langsung dalam rangka secara bersama-sama mengidentifikasi peluang, tantangan, kelemahan, dan keuntungan yang ingin dicapai melalui proses yang berorientasi konsensus.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris dinas pendidikan Kabupaten Wajo mengemukakan bahwa :

“Dalam proses perumusan kebijakan kita aktif berkomunikasi dan berkoordinasi secara langsung melalui temu rapat. Sebab, dalam mengentaskan kasus anak putus sekolah ini tidak bisa hanya ditekankan pada satu instansi saja, Dinas Pendidikan misalnya. Ini dikarenakan faktor penyebab anak putus sekolah terbilang banyak dan luas, seperti minat anak untuk bersekolah tidak ada lagi, pola asuh orang tua, ekonomi keluarga tidak stabil, dan lain sebagainya. Sehingga, pada proses perumusan kebijakan program ini, banyak instansi yang dilibatkan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, termasuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai mitra pemerintah. Selama proses perumusan ini kita coba mengkaji dan menganalisa bagaimana strategi untuk menurunkan angka anak putus sekolah, peluang-peluangnya, kemungkinan dampaknya, dan lain-lain. Kita juga mempertimbangkan bagaimana melalui program ini dapat menciptakan multiplayer effect.” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo BT saat diwawancarai Senin, 24 Juli 2023.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mengemukakan bahwa :

“Kita sudah rutin melakukan musyawarah bersama atau dialog tatap muka dengan melibatkan para stakeholders yang terkait. Sampai pada akhirnya, kita rutin melakukan rapat triwulan untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan program.” jelas Ketua Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Wajo AS saat diwawancarai Jumat, 11 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dan pengumpulan data, indikator dialog tatap muka dalam proses *Collaborative*

Governance turut dilaksanakan oleh para sektor yang terlibat dalam kolaborasi pada penanganan anak putus sekolah. Melalui dialog tatap muka, para *stakeholders* yang terlibat akan saling membuka ruang untuk berkomunikasi. Sebab, komunikasi merupakan salah satu media untuk menghadirkan kesepakatan bersama.

Dialog tatap muka dalam proses kolaborasi penanganan anak putus sekolah bahkan sudah berlangsung sejak proses perumusan dan perancangan penganggaran program. Selanjutnya, setelah proses perumusan dan perancangan program selesai, dialog tatap muka secara intensif dilakukan. Dalam setiap proses dialog tatap muka, diperlukan adanya *leading sector* yang berfungsi untuk mengendalikan kondusifitas dialog, dalam hal ini dinas pendidikan berperan sebagai *leading sector*. Sementara itu, mitra *non state*, berperan sebagai pendamping program sekaligus mediator apabila proses dialog tatap muka berlangsung kaku dan alot dalam menghadapi persoalan.

Adanya dialog tatap muka yang diselenggarakan secara rutin dan intensif per 3 bulan sekali berdasarkan keputusan bersama, mendorong terciptanya sistem kolaborasi yang efektif terkait penanganan persoalan yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan penanganan anak putus sekolah. Selain itu, melalui dialog tatap muka yang berlangsung dengan baik dapat pula memperkuat rasa percaya antar sektor yang terlibat dalam proses kolaborasi ini.

b. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Dalam proses kolaborasi, membangun rasa percaya antar *stakeholders* perlu untuk dilakukan sebab para *stakeholders* tentu memiliki masing-masing kepentingan dan khawatir akan memunculkan ego sektoral yang dapat menghambat jalannya kolaborasi. Dalam hal ini, hasil penelitian melalui wawancara peneliti dengan sekretaris dinas pendidikan mengemukakan :

“Dalam membangun rasa percaya antar stakeholders ini juga melalui banyaknya diskusi dan pertemuan secara langsung untuk membangun komunikasi. Banyak pendapat dan argumen, namun coba kita satukan. Namun, karena sudah pernah ada kolaborasi sebelumnya dalam program lain, maka membangun rasa percaya antar stakeholders ini pun tidak begitu sulit. Keterbukaan menjadi salah satu faktor pendukung terbangunnya rasa percaya antar stakeholders.” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo BT saat diwawancarai Senin, 24 Juli 2023.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mengemukakan bahwa :

“Rasa percaya ini terbangun perlahan-lahan ketika perumusan program. Kita melihat para stakeholders yang terlibat ini begitu terbuka dan saling menerima atas setiap argumen. Dalam artian, setiap argumen dalam dialog bersama itu pasti ada namun dapat menemukan solusinya karena tiap-tiap pihak yang terlibat itu terbuka satu sama lain.” jelas Ketua Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Wajo AS saat diwawancarai Jumat, 11 Agustus 2023.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui teknik wawancara bersama *stakeholders* yang terlibat langsung dalam kolaborasi penanganan anak putus sekolah, rasa percaya antar satu sama lain dibangun

salah satunya melalui proses dialog tatap muka yang berlangsung intensif. Untuk itu, membangun rasa percaya tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari indikator dialog tatap muka. Selain itu, dalam proses kolaborasi ini, berdasarkan hasil penelitian, bahwa rasa percaya antar sektor yang terlibat dapat terbangun juga disebabkan oleh tingkat keseriusan dan komitmen masing-masing sektor yang terlibat dalam menjalankan tugasnya.

c. *Commitment to the process* (komitmen terhadap proses)

Komitmen merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan kolaborasi. Komitmen harus ada di setiap *stakeholders* yang terlibat. Komitmen yang dibangun atas dasar kesadaran saling ketergantungan antar masing-masing instansi yang terlibat dan atas dasar kesadaran bahwa tujuan akan mudah tercapai apabila dilakukannya kolaborasi ketimbang dilakukan hanya oleh masing-masing instansi saja. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris dinas pendidikan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara peneliti, yakni :

“Untuk menjaga komitmen para stakeholders ini dalam implementasi penanganan anak putus sekolah, kita gabungkan para pelaksana program dari masing-masing instansi, sehingga meningkatkan dan menjaga akuntabilitas masing-masing instansi.” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo BT saat diwawancarai Senin, 24 Juli 2023.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mengemukakan bahwa :

“Penanganan anak putus sekolah ini salah satu bentuk untuk menjaga komitmen dan mempertegas akuntabilitas kinerja para pelaksana.” jelas

Ketua Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Wajo AS saat diwawancarai Jumat, 11 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara, dapat dijelaskan bahwa untuk menjaga komitmen dan akuntabilitas, tidak terlepas dari indikator dialog tatap muka dan rasa percaya satu sama lain. Komitmen terhadap proses terbangun juga disebabkan keberhasilan kolaborasi ini dalam melakukan dialog tatap muka dan membangun rasa percaya antar satu sama lain sehingga menciptakan rasa saling ketergantungan untuk bahu-membahu menjalankan program. Semakin tergantung suatu aktor dalam proses kolaborasi maka akan semakin memperkuat komitmen terhadap hubungan yang dijalin.

d. *Shared understanding* (saling memahami)

Pada indikator ini, penting bagi para *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi berbagi pemahaman terkait dengan tujuan dan masalah yang dihadapi serta mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi. Para *stakeholders* yang terkait diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam rangka menemukan solusi apabila terdapat permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris dinas pendidikan Kabupaten Wajo mengemukakan bahwa :

“Berbagi pemahaman dan sharing informasi itu sangat berjalan dengan baik. Karena itu salah satu faktor utama jalannya kolaborasi. Seperti misalnya, Dinas Pendidikan itu berbagi informasi mengenai data anak putus sekolah di Kabupaten Wajo, mengemukakan permasalahan dan

penyebab anak putus sekolah dari segi lingkungannya apa. ” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo BT saat diwawancarai Senin, 24 Juli 2023.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mengemukakan bahwa :

“Kolaborasi dalam penanganan anak putus sekolah ini terbilang cukup baik disebabkan oleh proses berbagi pemahaman antar lintas sektor yang terlibat juga baik. Hal ini dikarenakan minimnya ego sektoral yang muncul. Sebagai contoh, ternyata penyebab anak putus sekolah ini ada kendalanya di orang tua anak itu sendiri. Permasalahan ini tentunya disampaikan ketika dialog bersama.” jelas Ketua Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Wajo AS saat diwawancarai Jumat, 11 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui teknik wawancara dan pengumpulan data, dapat dijelaskan bahwa indikator berbagi pemahaman dapat berjalan dengan baik apabila pada masing-masing sektor yang terlibat dalam kolaborasi ini yakni memiliki rasa ketergantungan satu sama lain dan pemahaman terhadap tujuan bersama. Dalam artian, penanganan anak putus sekolah ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila masing-masing sektor merasa bahwa tidak membutuhkan bantuan dari sektor lain untuk menyukseskan penanganan anak putus sekolah ini sehingga masing-masing sektor tidak terbuka terhadap segala informasi dan pemahaman yang dimiliki dalam forum dialog tatap muka. Sebab, indikator berbagi pemahaman merupakan salah satu hal yang penting dalam proses kolaborasi. Saling berbagi pemahaman, informasi, data, maupun permasalahan yang dialami masing-masing sektor terkait penanganan anak putus sekolah menciptakan

proses kolaborasi yang efektif dan solutif terhadap persoalan yang sedang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, berbagi pemahaman dalam proses kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada forum kolaborasi itu sendiri, melainkan hingga kepada lini yang dianggap turut dapat mendorong keberhasilan program dalam mencapai tujuan.

e. *Intermediate outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Hasil yang dimaksud merupakan *output* dari proses kolaborasi yang dapat dilihat dari kesuksesan awal, bentuk perencanaan yang strategis, dan lainnya. Menurut sekretaris dinas pendidikan berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengemukakan bahwa :

“Penanganan anak putus sekolah ini terbilang merupakan sebuah program dengan perencanaan strategis melalui tujuan multiplayer effect-nya. Maka dari itu program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya berdampak terhadap penurunan angka anak putus sekolah namun juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah dimasa depan. Nah untuk hasil sementara bisa kita lihat dari angka anak putus sekolah yang setiap tahun angkanya terus menurun.” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo BT saat diwawancarai Senin, 24 Juli 2023.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mengemukakan bahwa :

“Penurunan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo itu menjadi hasil sementara yang memuaskan. Sebab, pada tahun 2020 angka anak putus sekolah mencapai 1.032 meskipun bukan yang tertinggi di Sulawesi Selatan namun pemerintah berusaha agar angka anak putus sekolah setiap tahunnya dapat berkurang dapat dilihat pada tahun 2022 angka

anak putus sekolah menurun menjadi 703.” jelas Ketua Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Wajo AS saat diwawancarai Jumat, 11 Agustus 2023.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui teknik wawancara dan pengumpulan data, maka dapat dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* pada penanganan anak putus sekolah telah mewujudkan hasil sementara yang memuaskan. Penanganan anak putus sekolah sedikit demi sedikit telah menunjukkan *progress*-nya. Tentu keberhasilan dalam indikator ini menjadi bukti nyata pendukung keberhasilan indikator yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya meskipun terbilang keberhasilan kecil. Lebih lanjut, hasil sementara yang didapatkan dalam proses kolaborasi ini akan menjadi motivasi bagi para *stakeholders* yang terlibat untuk terus meningkatkan kapasitas kinerjanya dalam melaksanakan penanganan anak putus sekolah melalui desain *Collaborative Governance*.

Beberapa hasil sementara yang berhasil diwujudkan melalui proses kolaborasi dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Wajo untuk tiga tahun terakhir yakni 2020 sampai dengan 2022, akan digambarkan oleh (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Kondisi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo

Tingkat Pendidikan	Kondisi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo		
	2020	2021	2022
SD	537	492	389
SMP	264	238	145
SMA	231	217	169
Jumlah	1.032	947	703

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Dari Tabel 4.3 menunjukkan kondisi anak putus sekolah setiap tahunnya mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2020 jumlah anak putus sekolah mencapai angka 1.032 anak, pada tahun 2021 berada pada angka 947, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu pada 703 anak. Hal ini membuktikan adanya penurunan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Dimana, pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah antara lain yaitu mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, hasil sementara yang didapat melalui proses kolaborasi penanganan anak putus sekolah, tidak hanya pada penurunan angka anak putus sekolah. Namun juga keberhasilan dalam meningkatkan antusiasme masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk membawa anaknya bersekolah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wajo cukup memprihatinkan bagi setiap orang terutama bagi pemerintah daerah. Pendidikan formal membutuhkan proses belajar mengajar di bangku sekolah dan beberapa jenjang atau tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Perguruan Tinggi. Namun dalam proses pendidikan secara formal belum dapat terealisasi secara maksimal disebabkan karena masih adanya kondisi anak putus sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Wajo.

Berikut data perbandingan anak putus sekolah dengan anak sekolah yang ada di Kabupaten Wajo :

Tabel 4.4 Perbandingan Anak Putus Sekolah dan Anak Sekolah Di Kabupaten Wajo Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	Jumlah		
		Anak Putus Sekolah	Anak Sekolah	Sekolah
SD / Sederajat	6-11/ 7-12	389	41.635	399
SMP / Sederajat	11-14 / 12-15	145	12.177	74
SMA / Sederajat	14-17 / 15-18	169	10.296	32
Jumlah		703	64.108	505

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Berdasarkan tabel 4.4 angka anak putus sekolah terjadi pada tingkat SD (Sekolah Dasar) sebesar 389 anak dan anak yang sekolah sebesar 41.635 anak. Kemudian pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) anak putus sekolah mencapai angka 145 anak dan anak yang sekolah sebesar 12.177 anak. Dan anak putus sekolah pada tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas) mencapai angka 169

anak, sedangkan anak sekolah sebesar 10.296 anak. Jumlah anak putus sekolah untuk tahun 2022 mencapai 703 anak. Hal tersebut menunjukkan penurunan signifikan dari tahun ketahun. Keadaan sarana dan prasarana yakni jumlah sekolah di setiap tingkat pendidikannya sekiranya sangat memadai, namun kondisi anak putus sekolah dapat disebabkan karena beberapa faktor yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya. Data Anak Putus Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin yang ada di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Data Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Ada Di Kabupaten Wajo Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
SD / Sederajat	214	175	389
SMP / Sederajat	70	75	145
SMA / Sederajat	96	73	169
Total	380	323	703

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada tingkat SD, kondisi anak putus sekolah mencapai angka 214 untuk anak laki-laki dan 175 untuk anak perempuan. Tingkat SMP menunjukkan kondisi anak putus sekolah mencapai angka 70 untuk anak laki-laki dan 75 untuk anak perempuan dan kondisi anak putus sekolah pada tingkat SMA anak laki-laki mencapai angka 96 dan anak perempuan mencapai angka 73. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kondisi anak yang putus sekolah di Kabupaten Wajo didominasi oleh anak laki-laki, kecuali di tingkat SMP yang didominasi oleh anak perempuan.

Kasus anak putus sekolah tentunya tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi anak sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan sekolah

yang wajar saja terjadi karena anak dihadapkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luar diri anak seperti lingkungan dan sebagainya.

a. Collaborative Governance yang dilakukan dengan face to face dialogue (dialog tatap muka)

Dalam proses kolaboratif dipastikan akan terjadi perbedaan pandangan antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dialog disini dibutuhkan untuk membangun *consensus*, kesepakatan, dan aturan main yang jelas sehingga dapat tercipta proses kolaborasi yang efektif.

Bentuk *Face to Face Dialog* yang dilakukan antara lain dengan melakukan rapat koordinasi. Rapat yang dilakukan tentunya dihadiri oleh jajaran yang terlibat di pemerintahan khususnya Dinas Pendidikan bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kolaborasi yang dilakukan tentunya berbasas pada kepentingan bersama dalam membangun tatanan pendidikan yang lebih baik.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya putus sekolah pada anak yaitu dengan memberikan sumbangsi materi berupa biaya bantuan pendidikan dan sumbangsi tenaga dalam bentuk penyuluhan pendidikan yang akan memberikan edukasi terkait urgensi pendidikan.

b. Collaborative Governance yang dilakukan dengan Trust building (membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat merupakan proses yang membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi proses membangun

kepercayaan harus dilaksanakan karena akan menjadi dasar dari proses kolaboratif yang akan dilaksanakan.

Adapun dalam hal ini kedua belah pihak akan selalu melakukan evaluasi dan kordinasi secara berkala untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan seperti meninjau kembali apakah program bantuan yang telah dilakukan tepat sasaran pada orang-orang yang membutuhkan.

c. *Collaborative Governance* yang dilakukan dengan *Commitment to the process* (komitmen terhadap proses)

Komitmen para *stakeholders* dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan proses kolaborasi. Melalui komitmen, pihak-pihak terkait harus bersedia menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda ke dalam satu pandangan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, sebelum membangun komitmen dibutuhkan kepercayaan satu sama lain (tahap sebelumnya) agar tanggung jawab masing-masing pihak dapat dijalankan dengan baik.

Dalam hal ini hasil keputusan rapat biasanya diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga tidak ada yang merasa lebih dominan diantara yang lain (merasa menang atau kalah). Karena tentunya kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama dalam proses ini yakni untuk mengatasi terjadinya peningkatan jumlah anak putus sekolah.

d. Collaborative Governance yang dilakukan dengan Shared understanding (saling memahami)

Pemahaman bersama berkaitan dengan visi dan misi bersama, kesamaan tujuan, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, penyelarasan nilai-nilai inti, dan penyelarasan pada definisi masalah.

Dalam hal ini kedua belah pihak tidak memiliki ego yang tinggi dan merasa diri paling *superior* melainkan kedua belah pihak harus saling mengerti dan memberikan saran agar program yang akan dijalankan dapat dirasakan manfaatnya secara bersama.

e. Collaborative Governance yang dilakukan dengan Intermediate outcome (hasil akhir yang dicapai)

Hasil yang dimaksud merupakan keuntungan yang diperoleh dari kolaborasi antar *stakeholders* dalam proses kolaboratif yang terjadi. Inti dari model kolaborasi ini terletak pada variabel proses kolaborasi. Kolaborasi akan terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari sebuah kolaborasi bersifat konkrit.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa :

1. ***Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di**

Kabupaten Wajo : yaitu, a. *Face to face dialog* (dialog tatap muka).

Adanya dialog tatap muka yang diselenggarakan secara rutin dan intensif per 3 bulan sekali berdasarkan keputusan bersama, mendorong terciptanya sistem kolaborasi yang efektif terkait penanganan persoalan yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan penanganan anak putus sekolah. b. *Trust Building* (membangun kepercayaan). Untuk itu, membangun rasa percaya tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari indikator dialog tatap muka. c. *Commitment to the process* (komitmen terhadap proses). Semakin tergantung suatu aktor dalam proses kolaborasi maka akan semakin memperkuat komitmen terhadap hubungan yang dijalin. d. *Shared understanding* (saling memahami). Saling berbagi pemahaman, informasi, data, maupun permasalahan yang dialami masing-masing sektor terkait penanganan anak putus sekolah menciptakan proses kolaborasi yang efektif dan solutif terhadap persoalan yang sedang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. e. *Intermediate outcome* (hasil akhir yang dicapai). Hasil sementara yang didapat melalui proses kolaborasi penanganan anak putus sekolah, tidak hanya pada penurunan angka anak putus sekolah.

Namun juga keberhasilan dalam meningkatkan antusiasme masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk membawa anaknya bersekolah.

5.2 Saran

Adapun saran dan rekomendasi dari penulis terkait penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo yaitu :

1. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah di setiap wilayah Pemerintah Kabupaten Wajo secara merata. Data ini, kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan yang menjadi pegangan dalam menekan angka anak putus sekolah.
2. Pemerintah daerah perlu terus mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah ke setiap pelosok daerah yang ada di Kabupaten Wajo dan dalam pelaksanaannya bersifat berkelanjutan.
3. Pemerintah daerah perlu membangun sistem kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak yang terkait dalam menekan angka anak putus sekolah secara terprogram dan berkelanjutan seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan semua pihak yang terkait mulai dari pemerintah kabupaten hingga desa dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menekan angka anak putus sekolah demi pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell & Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory* JPART 18: 543-571.
- Asmara, Y. R. I., & Sukadana, I. W. (2016). Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? (Studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali). *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1347–1383.
- Ferry Afrisal, A., Thahir Haning, M., Akmal Ibrahim, M., & Yunus, M. (2022). *Collaborative Governance dalam Pembuatan Kebijakan*. 11(5), 631–639.
- Gunawan, A., & Ma'ruf, M. F. (2020). *Collaborative Governance dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)*. *Journal of Public Sector Innovation*, 1–10.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi *Good Governance* di Indonesia. *Public: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.
- I Nyoman Wijana1, M. S. (2018). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat I. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). *Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting*. *Kinerja*, 18(3), 383–391.
- Irawan. 2017. *Collaborative Governance* (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN 1303- 341X Volume 5, Nomor 3.
- Islamy H. 2018. *Collaborative governance* Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Koesbardiati, T., Kinasih, S. E., Murti, D. B., Ida, R., & Wahyudi, I. (2022). Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Permasalahan Anak Pekerja Migran. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 3(1), 72–83.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.

- Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82.
- Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wisata Menaggoro sebagai Wisata Halal. *Among Makarti*, 14(1), 1–14.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., & Nooresa, A. F. (2022). *Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi. Politica*, 13(2), 182–202
- Talakua, Y. (2018). Peran *Stakeholder* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 1.
- Trytami, A., Meutia, I. F., & Karmilasari, V. (2022). Sistem Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Palembang (Studi Pada Sekolah Filial ANJAL dan APS). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(2), 245–257.
- Ubaidillah, U. (2020). Pengembangan Minat Belajar Kognitif Pada Anak Usia Dini. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 3(1), 41

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

RIWAYAT HIDUP



Baso Erwin Hidayatullah dilahirkan di Anabanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juli 1999 sebagai anak ke enam dari enam bersaudara, dari ayah bernama H. Burhanuddin dan ibu bernama Hj. Rohani, S.Pd. Pendidikan Taman Kanak-kanak penulis selesaikan di TK Dharmawanita Anabanua pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan Dasar di SDN 40 Anabanua pada tahun 2012. Tahun 2015 lulus dari SMPN 1 Maniangpajo dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Maniangpajo pada tahun 2018. Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan penulis tempuh sejak tahun 2018 melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sampai mendapatkan gelar S.1 Jurusan Ilmu Pemerintahan. Selama mengikuti pendidikan penulis pernah aktif dalam beberapa keorganisasian baik organisasi dalam kampus maupun organisasi daerah. Penulis melaksanakan tugas akhir dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo”.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Informan



Gambar. Wawancara pada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo



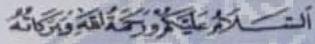
Gambar. Wawancara pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail ip3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2140/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 15 Muharram 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 02 August 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2093/FSP/A.1-VIII/VIII/1445 H/2023 M tanggal 2 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

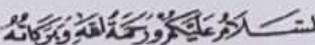
Nama : BASO ERWIN HIDAYATULLAH
 No. Stambuk : 10564 1109418
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Agustus 2023 s/d 7 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran




 Ketua LP3M,
 Universitas Muhammadiyah Makassar
 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761

08-23

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 22747/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Wajo
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2140/C.05/4-VIII/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: BASO ERWIN HIDAYATULLAH
Nomor Pokok	: 105641109418
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN WAJO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Agustus s/d 07 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 04 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Baso Erwin Hidayatullah
Nim : 105641109418
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurhidayah Sum, M.I.P.
NBM: 964691

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

AB I BASO ERWIN HIDAYATULLAH 105641109418

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

5%

Exclude quotes

Off

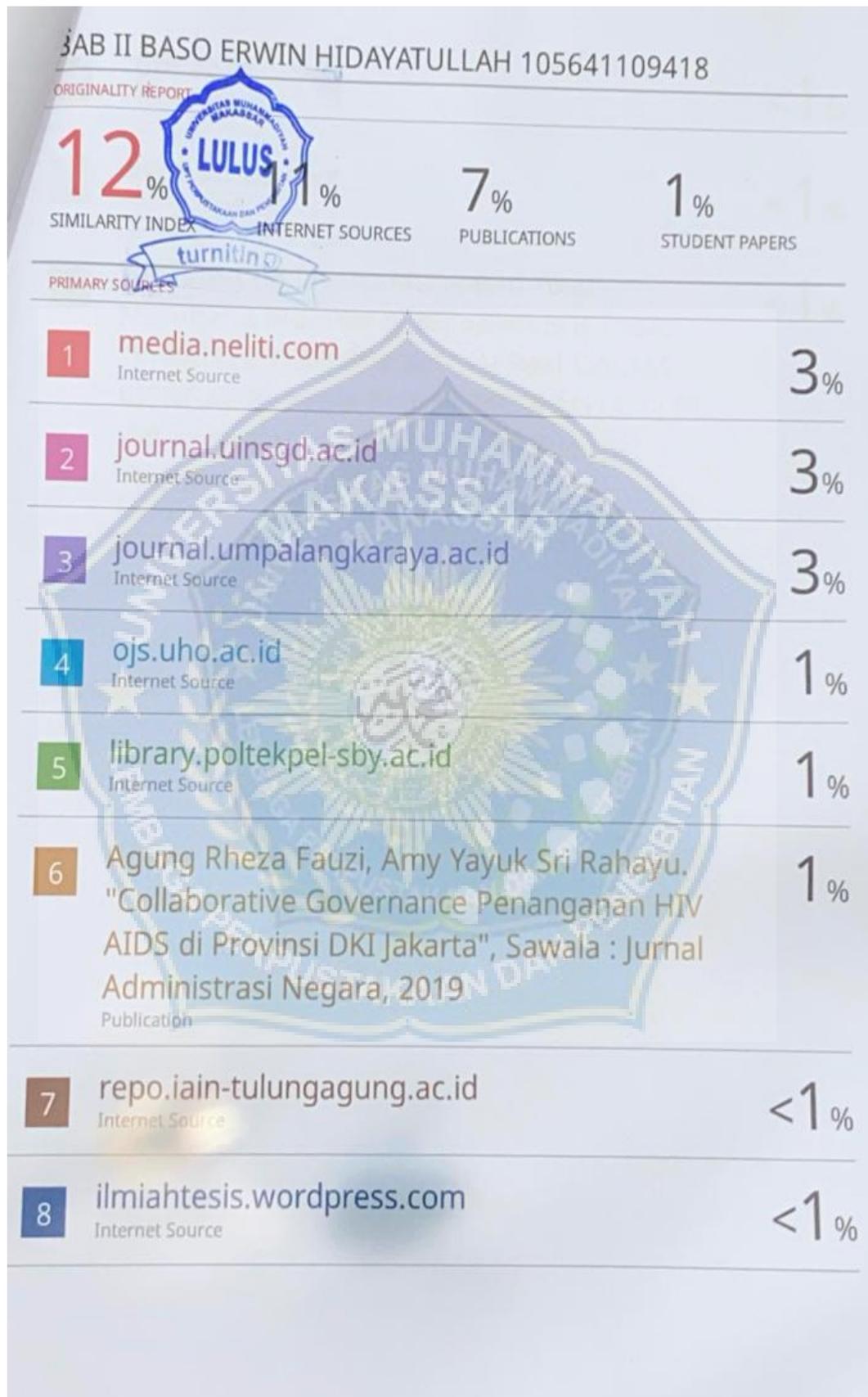
Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off





III BASO ERWIN HIDAYATULLAH 105641109418

ORIGINALITY REPORT

100% SIMILARITY INDEX

LULUS

6% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	6%
2	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	3%
3	arsyadhartina.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



AB IV BASO ERWIN HIDAYATULLAH 105641109418



4%

4%

0%

0%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | tokosutera.wordpress.com
Internet Source | 2% |
| 2 | repository.umy.ac.id
Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off



AB V BASO ERWIN HIDAYATULLAH 105641109418

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ub.ac.id
Internet Source

4%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

